

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK
HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
PEREMPUAN TINGKAT SMP/MTs DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2010 DAN 2011**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

Yeni Prastiwi
B 200 100 260

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :


**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK
HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
PEREMPUAN TINGKAT SMP/MTs DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2010 DAN 2011**

Yang ditulis oleh :

YENI PRASTIWI
B 200 100 260

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2014

Pembimbing

(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Eriyono, M.Si)

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK
HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
PEREMPUAN TINGKAT SMP/MTs DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2010 DAN 2011**

Yeni Prastiwi
B200100260
[*prastiwi.yeni@gmail.com*](mailto:prastiwi.yeni@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan dan sisi pengeluaran terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs adalah desentralisasi fiskal, PDRB per kapita, jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah, dan jumlah guru.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan. Sedangkan desentralisasi fiskal yang diukur baik melalui sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah

Kata kunci: desentralisasi fiskal, angka melek huruf (AMH) perempuan, angka partisipasi sekolah (APS) perempuan SMP/MTs, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2001 Indonesia melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem pengelolaan pemerintahan. Proses pelaksanaannya diawali dengan penyempurnaan tatanan politik pemerintahan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, muncullah kebijakan baru pemerintah yang dikenal dengan otonomi daerah yang kemudian diberlakukanlah sistem desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan memberikan diskresi belanja daerah yang luas dan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan (Sipahutar, 2013). Dana transfer dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil non pajak (SDA), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). Transfer dana ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari.

Pada paradigma pembangunan global, pendidikan merupakan salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals (MDGs)*. Salah satu tujuan MDGs yaitu menghapus ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan karena kesetaraan gender penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan gender yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan diberbagai daerah.

Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang tidak terlalu mencolok. Daerah yang memiliki angka melek huruf perempuan tertinggi yaitu Kota Magelang sedangkan angka melek huruf perempuan terendah berada di Kabupaten Wonogiri. Untuk angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs mengalami fluktuasi positif. Daerah yang memiliki angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs tertinggi yaitu Kota Salatiga, yang kedua adalah Kota Surakarta, dan yang ketiga adalah Kabupaten Purworejo. Angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs terendah berada di Kabupaten Pekalongan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Desentralisasi fiskal menjadi suatu hal yang sangat penting dalam masa

otonomi daerah karena dengan kewenangan yang diberikan maka pemerintah daerah dapat dengan bebas menentukan kebijakan-kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah (Suparno, 2010 dalam Indah, 2011). Desentralisasi fiskal dianggap sebagai alat untuk mengambil kebijakan dalam penyediaan barang publik yang sesuai dengan permintaan masyarakat dan diharapkan dapat membuka akses barang publik bagi peningkatan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia desentralisasi fiskal dapat diukur dari dua sisi pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendekatan dari sisi pengeluaran pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk mengukur permasalahan gender di bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan cara penggunaan pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah sebagai wewenang atau tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Bakti dan Kodatie (2012), menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran dengan analisis *fixed effect methode* tidak berpengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan maupun terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_1 =$ Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011.

Huda dan Sasana (2013), di Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka kelulusan sekolah dan tingkat putus sekolah siswa. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah tidak ditemukan hasil yang signifikan. Output pendidikan berupa tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK belum memberikan hasil pengaruh yang signifikan terhadap outcomes pendidikan. Berdasarkan penelitian

terdahulu dan teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_2 =$ Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*panel data*) di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yang berupa *outcomes* bidang pendidikan, yaitu angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs. Variabel independen yang berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah desentralisasi fiskal yang dilihat melalui sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Selain itu, digunakan pula variabel kontrol berupa PDRB per kapita, jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah, dan jumlah guru.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$AMHPer = a_1 + a_2DECPAD + a_3Y + a_4POP + a_5JS + u \quad (1)$$

$$AMHPer = b_1 + b_2DECEXP + b_3Y + b_4POP + b_5JS + u \quad (2)$$

$$APSPer = c_1 + c_2DECPAD + c_3Y + c_4POP + c_5JS + c_6JG + u \quad (3)$$

$$APSPer = d_1 + d_2DECEXP + d_3Y + d_4POP + d_5JS + d_6JG + u \quad (4)$$

Dimana:

AMHPer = Angka melek huruf perempuan

APSPer = Angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs

DECPAD = Derajat desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan

DECEXP = Derajat kemandirian daerah yang diukur dari sisi pengeluaran

POP = Jumlah penduduk perempuan

Y = Regional GDP per kapita (produk domestik regional bruto)

JS = Jumlah sekolah

JG = Jumlah guru

u = *error terms*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model

Data panel dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011 dalam penelitian ini diestimasi dengan persamaan mereplika model analisis dari Uchimura dan Jutting (2009) dalam Bakti et al (2012). Hasil estimasi persamaan pada penelitian in sebagai berikut:

Model pengaruh desentralisasi fiskal sisi pendapatan terhadap AMH perempuan

$$\text{AMHPer} = 85,788 + 52,542(\text{DECPAD}) - 2,937\text{E-}7(\text{Y}) - 6,752\text{E-}006(\text{POP}) \\ + 0,007(\text{JS})$$

$$R^2 (0,280)$$

$$\text{Adjusted } R^2 (0,236)$$

$$F (6,335)$$

Model pengaruh desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap AMH perempuan

$$\text{AMHPer} = 94,076 - 226,862(\text{DECEXP}) + 1,322\text{E-}6(\text{Y}) - 1,729\text{E-}6(\text{POP}) \\ + 6,193\text{E-}5(\text{JS})$$

$$R^2 (0,380)$$

$$\text{Adjusted } R^2 (0,337)$$

$$F (9,021)$$

Model pengaruh desentralisasi fiskal sisi pendapatan terhadap APS perempuan SMP/MTs

$$\text{APSPer} = 86,528 + 32,878(\text{DECPAD}) - 3,859\text{E-}7(\text{Y}) - 2,918\text{E-}5(\text{POP}) - 0,076(\text{JS}) \\ + 0,007(\text{JG})$$

$$R^2 (0,311)$$

$$\text{Adjusted } R^2 (0,256)$$

$$F (5,685)$$

Model pengaruh desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap APS perempuan SMP/MTs

$$\text{APSPer} = 91,035 + 22,310(\text{DECEXP}) - 1,468\text{E-}7(\text{Y}) - 2,872\text{E-}5(\text{POP}) - 0,074(\text{JS}) + 0,007(\text{JG})$$

$$R^2 (0,290)$$

$$\text{Adjusted } R^2 (0,229)$$

$$F (4,737)$$

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DECPAD) terhadap AMH Perempuan

Berdasarkan hasil olah data pada model pertama terbukti bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai koefisien DECPAD sebesar 52,242 dengan parameter positif. Artinya apabila DECPAD meningkat satu satuan, maka angka melek huruf perempuan akan meningkat sebesar 52,242. Variabel kontrol dalam model pertama seperti PDRB per kapita, jumlah penduduk perempuan dan jumlah sekolah tidak signifikan mempengaruhi angka melek huruf perempuan sebagai variabel dependen.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DECEXP) terhadap AMH Perempuan

Berdasarkan hasil pengolahan data model kedua menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai koefisien DECEXP sebesar -226,862 dengan parameter negatif. Artinya apabila DECEXP menurun sebesar satu satuan, maka angka melek huruf perempuan akan meningkat sebesar 226,862.

Variabel kontrol dalam model kedua yang berpengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan hanya PDRB per kapita. Hal tersebut diperoleh dari besarnya nilai koefisien PDRB per kapita sebesar 1,322E-6 dengan parameter positif. Artinya apabila PDRB per kapita meningkat satu satuan maka angka melek huruf perempuan akan meningkat sebesar 1,322E-6.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DECPAD) terhadap APS Perempuan SMP/MTs

Berdasarkan hasil olah data model ketiga terbukti bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai koefisien DECPAD sebesar 32,878 dengan parameter positif. Artinya apabila DECPAD meningkat sebesar satu satuan, maka angka partisipasi sekolah perempuan akan meningkat sebesar 32,878.

Variabel kontrol pada model ketiga yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan adalah jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah dan jumlah guru.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DECEXP) terhadap APS Perempuan SMP/MTs

Berdasarkan hasil pengolahan data model keempat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka melek huruf perempuan. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai koefisien DECEXP sebesar 22,310 dengan parameter positif. Artinya apabila DECEXP meningkat sebesar satu satuan, maka angka partisipasi sekolah perempuan akan meningkat sebesar 22,310.

Variabel kontrol pada model keempat yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan antara lain jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah dan jumlah guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011 maka dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan dan sisi pengeluaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka melek huruf

perempuan. Daerah dengan angka melek huruf perempuan tertinggi berada di Kota Magelang dan terendah berada di Kabupaten Wonogiri.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan menunjukkan bahwa variabel kontrol seperti jumlah penduduk perempuan dan jumlah sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan sebagai variabel dependen. Untuk variabel kontrol yang lain yaitu PDRB per kapita ditemukan hasil yang berbeda, dari sisi pendapatan menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan namun dari sisi pengeluaran PDRB per kapita terbukti memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka melek huruf perempuan.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi linier berganda diketahui bahwa variabel desentralisasi fiskal baik melalui sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs. Angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs tertinggi di Kota Salatiga dan terendah di Kabupaten Pekalongan. Variabel kontrol dalam persamaan ini yaitu PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs sedangkan jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah dan jumlah guru memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: (1) Data rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua tahun di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs, (2) Terbatasnya data dalam menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs.

SARAN

Berdasarkan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang ingin diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya data rentang waktu penelitian harap ditambah, sehingga hasilnya dapat memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, (2) Peneliti berikutnya harap menambahkan variabel-variabel yang lebih spesifik mempengaruhi angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dina. 2011. "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Kematian Bayi Dan Angka Melanjutkan SMP/MTs Periode 2007-2009". Skripsi S1 dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2010 s/d 2012. Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, Statistika Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011. Publikasi Digital BPS Provinsi Jawa Tengah
- Bakti, Pramilo Galih dan Kodoatie, Maria Johanna. 2012. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Vol. 1, No. 1
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan DAERAH*. Penerbit PT INDEKS Kelompok Gramedia. Gorontalo
- Fahmi, Sudi. 2009. *Hukum Otonomi Daerah*. Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2005 dan 2011. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 19*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Huda, Noval Akhmad dan Sasana, Hadi. 2013. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta)". *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS* , Vol. 2, No. 1
- Indah, Siska Permata. 2011. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Skripsi S1 dipublikasikan. Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Jimenez-Dolores, Rubio . 2010. "Is fiscal decentralization good for your health? Evidence from a panel of OECD countries", HEDG Working Paper 10/30, University of Granada, Campus Universitario de Cartuja. Department of Applied Economics

Makruf, Dikko Alrahman. 2011. "Jendela Wawasan (blog)." (online) (<http://dighaalraizha.blogspot.com/2011/10/konsep-desentralisasi-dan-dekonsentrasi.html>) diakses tanggal 24 September 2013)

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal. 25

Nitha. 2012. "Pengertian MDGs". (online). (<http://nithaw.blogspot.com/2012/04/pengertian-mdgs.html>) diakses tanggal 25 September 2013)

Pasaribu, Fernando. 2012. "Uji Asumsi Klasik". (online), (<http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/uji-asumsi-klasik.pdf>) diakses pada tanggal 25 September 2013)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Prasetya, Ferry. 2012. MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN V: TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Priyatno, Duwi. 2009. *SPPS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

Purusa, Mahocca Swangga dan Sasana, Hadi. 2013. IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP AKABA DAN APM SD/MI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2010. Vol. 2, No. 1

Salinas, Paula dan Sole-Olle, Albert. 2009. "[Evaluating the effects of decentralization on educational outcomes in Spain](#)," *Working Papers in Economics* 228, Universitat de Barcelona. Espai de Recerca en Economia

Saragih, Juri Panglima. 2003. *DESENTRALISASI FISKAL DAN KEUANGAN DAERAH DALAM OTONOMI*. Ghalian Indonesia. Jakarta

- Sianturi, Y. Simonsen. 2011. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)". Skripsi S1 dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Sipahutar, Mangasa Augustinus. 2013. "Desentralisasi Fiskal dan Perekon Daerah". (online). (<http://www.investor.co.id/home/desentralisasi-fiskal-dan-perekonomian-daerah/62052> diakses tanggal 7 Oktober 2013 pukul 23:03 WIB)
- Siska. 2012. "Pengertian Produk Dpmestik Regional Bruto". (online). (<http://matakristal.com/pengertian-produk-domestik-regional-bruto-pdrb/> diakses tanggal 1 Januari 2014 pukul 16:06 WIB)
- Soebagiyo, Daryono. 2013. "Perekonomian Indonesia". Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sritua, Arief. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta : UI-Press
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung
- Suparmoko. 2003. *EKONOMI PUBLIK Edisi Pertama*. Andi Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah